

Desentralisasi Manajemen Pembiayaan Dan Konflik Dalam Mahalnya Biaya Pendidikan

Sefhia Naila Sabrina¹, Anne Effane²

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Agama Islam Dan Pendidikan Guru, Universitas Djuanda Bogor

Email : hiksss1393@gmail.com¹, anne.effane83@gmail.com²

Abstrak

Desentralisasi pendidikan memberikan peluang dampak kesenjangan di pembiayaan pendidikan sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan disparitas mutu. Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 membawa perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan. Itulah sebabnya pembiayaan pendidikan menjadi komponen terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan. Di era otonomi daerah, urusan pendidikan dari tingkat TK hingga SMA menjadi tanggung jawab daerah dan masa depan pendidikan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan. Namun sayangnya pelaksanaan otonomi pendidikan yang di lakukan oleh pemerintah daerah belum berjalan sepenuhnya karena keterbatasan anggaran, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya.

Otonomi Pendidikan dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan kerja tenaga pendidikan serta menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret, sumber daya pendidikan dapat didayagunakan secara optimal, dapat menggali potensi lokal secara lebih efektif, dapat mengelola sistem pendidikan yang sejalan dengan kebudayaan setempat, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan meningkat, akuntabilitas juga meningkat, dan pada gilirannya mutu pendidikan dapat terjamin. Dengan otonomi pendidikan, maka efek positif yang muncul adalah terjadinya perbaikan pendidikan di tingkat lokal, efisiensi administrasi, efisiensi keuangan, dan terwujudnya pelayanan pendidikan berkualitas serta sebagai instrumen vital dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan.

Kata kunci: desentralisasi pendidikan, biaya pendidikan, pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Otonomi daerah atau desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengurus sistem pemerintahan dalam upaya kemajuan sesuai cita-cita masyarakat yang lebih baik, adil dan sejahtera. Dalam kaitan ini adanya otonomi membawa konsekuensi pembiayaan pendidikan, baik mengenai sumber pendanaan, sarana-prasarana dan kepegawaian. Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan di perkuatnya landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah karena pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia, serta pendidikan berfungsi sebagai pengembang pengetahuan, ketrampilan, nilai dan kebudayaan.

Pergeseran kewenangan yang begitu besar akan membawa dampak kepada terjadinya pergeseran paradigma dalam seluruh aspek manajemen pendidikan di daerah yang semula lebih dikelola secara sentralistik sekarang harus lebih didesentralisasikan, terutama di bidang persekolahan. Salah satu aspek yang didesentralisasikan adalah pengelolaan anggaran, termasuk anggaran pendidikan, dan inilah yang nantinya antara lain menjelaskan mengapa justru Pendidikan lebih mahal.

Di tinjau dari segi pemerintahan, pendidikan merupakan salah satu layanan dasar yang diperlukan oleh seluruh warga negara, selain kesehatan, yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh Daerah. Oleh sebab itu semangat desentralisasi di bidang pendidikan, harus selalu diartikan dalam rangka untuk dapat memberikan layanan dasar minimal dengan tetap memperhatikan upaya pemerataan kesempatan akan pendidikan yang bermutu. Karena mutu pendidikan akhirnya sangat ditentukan oleh proses pendidikan yang terjadi sehari-hari di sekolah, maka di hampir semua negara yang menetapkan desentralisasi pendidikan tidak hanya menyerahkan pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota, tetapi juga memberikan otonomi yang lebih luas ke sekolah untuk mengatur dirinya sendiri, yang kemudian disebut sistem Manajemen Berbasis-Sekolah (*school-based management*).

Di Indonesia, kebijakan untuk mendesentralisasikan pendidikan sampai ke tataran sekolah telah ditetapkan sebagai kebijakan nasional, bahkan disertai dengan perangkat penyertainya yaitu Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan yang pada prinsipnya untuk mendorong terwujudnya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di sekolah.

Di dalam itu juga terdapat kesan bahwa pendidikan semakin mahal yang ditandai oleh semakin meningkat biaya Pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orang tua sehingga seakan-akan sekolah diprivatisasikan, disebabkan oleh berbagai hal, yaitu: ketimpangan pendanaan daerah, kompetisi dengan sektor lain, beban biaya manajemen, terbatasnya biaya operasional dari pemerintah, meningkatnya aspirasi orang tua akan mutu pendidikan, rendahnya gaji guru yang diikuti dengan

meningkatnya tingkat konsumsi, serta penyalahgunaan kesempatan dalam kesempatan.

Dengan diterapkannya sistem manajemen berbasis sekolah yang dilengkapi dengan perangkat Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dalam organisasi pendidikan berlandaskan azas demokratisasi, transparansi, dan partisipasi, maka orang tua dan masyarakat akan lebih mudah memperoleh akses informasi tersebut orang tua akan merasa memiliki sekolah dan lebih meningkatkan partisipasinya. Selain itu, dengan semakin maraknya gejala putus hubungan kerja (PHK), meningkatnya pengangguran, dan semakin ketatnya persaingan dalam memperoleh pekerjaan, maka bekal pendidikan yang bermutu dianggap sebagai salah satu kunci untuk terjun dalam system persaingan yang semakin ketat tersebut. Apalagi dengan sering disebutkannya bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia sangat rendah baik oleh pejabat maupun media massa, maka aspirasi orang tua akan mutu pendidikan akan meningkat untuk memberikan bekal kepada anaknya tidak hanya dalam rangka persaingan lokal, tetapi juga nasional dan global.

METODOLOGI

Dalam pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji desentralisasi manajemen pembiayaan serta hambatan pembiayaan di bidang Pendidikan. Dari tujuan tersebut, kita dapat mengetahui

Yang di pakai yaitu studi pustaka yang mana Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian kuantitatif kausalitas.

HASIL DAN DISKUSI

Dari hasil dan diskusi ini terlepas dari persoalan anggaran, hasil pengamatan menunjukkan bahwa hambatan di bidang pendidikan yang dihadapi daerah sejak sebelum otonomi daerah hingga kini belum banyak bergeser. Persoalannya masih di sekitar permasalahan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak lengkap, jumlah dan mutu tenaga yang kurang dengan ketersebaran yang tidak merata. Akibatnya, kegiatan belajar- mengajar yang mengarah pada upaya perbaikan hasil belajar sulit terwujud. Banyak pihak menilai pengelolaan pelayanan pendidikan dasar di era otonomi daerah tidak menunjukkan perubahan, bahkan cenderung memburuk. Pendidikan di Indonesia menghadapi dilema terbatasnya anggaran di satu pihak dan tuntutan peningkatan mutu di lain pihak. Anggaran memang penting, tetapi yang lebih diperlukan adalah adanya kesepakatan

nasional tentang kebijakan pembangunan pendidikan yang didukung oleh kebersamaan tekad untuk melaksanakannya. Tantangan pertama yang harus dihadapi oleh para pengelola pendidikan adalah masalah pendanaan. Sebagai ilustrasi, rendahnya kualitas gedung sekolah, terutama SD, merupakan salah satu dampak keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi dana untuk sektor pendidikan. Di sisi lain, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memberi beban yang sangat berat bagi pemerintah. Pasal 49 menyatakan bahwa pemerintah (pusat maupun daerah) harus mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Oleh karenanya langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempraktekkan keterbukaan dan pengefisienan penggunaan anggaran yang tersedia. Pemerintah pusat dan daerah harus berupaya mencegah dan menekan kebocoran anggaran. Bersamaan dengan itu pemerintah pusat harus bertanggungjawab dalam menghindari terjadinya kesenjangan yang mencolok antar daerah, baik dalam proses maupun kinerja sektor pendidikan. Di samping itu semua, dialog terbuka dan berkesinambungan dengan masyarakat harus terus dijalin.

Dari persoalan yang berkaitan dengan target anggaran Pendidikan Sebagian terdapat pada masalah kemampuan finansial (affordability) pemerintah. Yang mana alokasi tersebut untuk Pendidikan hingga saat ini tidak dengan serta-merta bisa dianggap sebagai penyimpangan terhadap konstitusi.

Pada era otonomi daerah ini, kewenangan pusat di sektor pendidikan sangat terbatas, yakni di bidang kurikulum dan penetapan standar, selain tanggung jawab untuk pengelolaan perguruan tinggi. Itu pun dengan catatan bahwa peran pemerintah di tingkat perguruan tinggi lebih banyak di bidang regulasi dan pengawasan. Di luar itu, khususnya dalam pengelolaan wajib belajar, menjadi tanggung jawab daerah.

Sementara itu, berkaitan dengan masalah pendanaan solusinya adalah sebagai berikut :

1. Alokasi dana APBN untuk pembangunan sektor pendidikan sebaiknya dilakukan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pendidikan, bukan melalui DIP departemen teknis (Depdiknas).
2. PEMDA sebaiknya mempertimbangan implementasi sistem earmarking dalam pembiayaan sektor pendidikan di daerah.

KESIMPULAN

Desentralisasi pendidikan memang memberikan peluang terjadinya dampak kesenjangan dalam pendanaan pendidikan sehingga akhirnya dapat berakibat

kepada ketimpangan mutu. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, peran Pemerintah Pusat sebagai regulator, dinamisator, dan resources allocator sangat menentukan. Peran itu dijamin dalam undang-undang sehingga perumusannya dapat dilakukan sehingga dapat diperoleh formula sistem pendanaan pendidikan yang lebih adil, merata, dan berorientasi kepada upaya peningkatan mutu.

Selain itu juga, desentralisasi pendidikan memang mendambakan hasil pendidikan yang bermutu dan untuk itu membutuhkan biaya yang besar, tetapi tidak setiap biaya yang besar menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Peran manajemen termasuk manajemen pendanaan pendidikan menjadi sangat penting agar dana yang tersedia secara langsung lebih digunakan untuk meningkatkan mutu, bukan digerogoti untuk membiayai manajemennya. yang lebih penting adalah bukannya seberapa mahal pendidikan, tetapi apakah dana pendidikan yang telah diperoleh dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat benar-benar dipergunakan dan dikembalikan semaksimal mungkin untuk pendidikan. Oleh sebab itu, peran Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan badan auditor independen dalam mengevaluasi akuntabilitas penggunaan dana pendidikan perlu ditingkatkan.

Dan juga mahal pendidikan tidak tergantung dari seberapa besar dana yang dipergunakan tetapi lebih kepada seberapa kemampuan bayar orang tua dan masyarakat dalam mendanai pendidikan. Oleh sebab itu, program subsidi silang baik yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan, masyarakat, bahkan orang tua peserta didik perlu digalakkan untuk memberikan peluang kepada peserta didik dari orang tua yang kurang mampu untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan yang bermutu sekalipun.

REFRENSI

- Rahma Setyawati, Pembiayaan Pendidikan, Jurnal Pendidikan Islam, Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Dirjen pendidikan Islam Departemen Agama RI dengan PPs Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga yogyakarta, Vol.2.No 1 Januari-April 2009.
- Tilaar, H.A.R 2004. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sagala, Syaiful. 2008. Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung : PT Alfabeta.
- Supriyadi, Dedi. 2004. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Musaheri, Membangun Otonomi Pendidikan Bermutu. Makalah Seminar Tahun 2001.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

_____. (2000). "Paradigma Baru Pengelolaan Pendidikan di Daerah Dalam Rangka Desentralisasi Pendidikan". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Strategi Manajer Pendidikan di Daerah Dalam Menghadapi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan , diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung tanggal 17-18 Juli 2000